

**PENGARUH BELANJA TIDAK TERDUGA TERHADAP DEFISIT KEUANGAN DAERAH
PERIODE ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 2019-2020
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Erlin Anggrista Aprilia

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
erlin.18042@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pemanfaatan APBD disetiap daerah memiliki proporsi yang berbeda tergantung pada prioritas masing-masing daerah. Namun dengan adanya kejadian tak terduga mengakibatkan daerah harus menyesuaikan APBD berjalan sehingga tidak mempengaruhi sektor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara belanja tidak terhadap defisit keuangan daerah APBD 2019-2020 Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi sehingga akan terlihat korelasi antar variabelnya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Sampling Jenuh*, peneliti menggunakan teknik ini dikarenakan populasi dalam penelitian tidak terlalu banyak yaitu APBD periode 2019-2020. Teknik pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi yang data nya diambil dari website resmi Pemkab Trenggalek. Teknik pengolahan data menggunakan teknik regresi linier sederhana sehingga dapat dilihat korelasi adakah pengaruh antara belanja tidak terduga dengan defisit keuangan daerah APBD Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Periode APBD Kabupaten Trenggalek 2019-2020 dinilai sangat kompleks, APBD selalu mengalami surplus namun diakhir periode terjadi perombakan APBD yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Kemudian dengan adanya masalah tersebut muncullah pertanyaan, adakah pengaruh atau tidak antara kedua variabel tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan untuk daerah sehingga dapat memanfaatkan APBD daerahnya dengan baik. Setelah mengetahui korelasi dari belanja tidak terduga dengan defisit keuangan daerah, maka daerah akan menjadi lebih berhati-hati untuk memanfaatkan APBD. Karena faktanya APBD tidak hanya digunakan sebagai tabel keuangan daerah saja melainkan sebagai tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengatur dan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya.

Kata Kunci : *Belanja Tidak Terduga, Defisit Keuangan Daerah, APBD, Kabupaten Trenggalek.*

Abstract

The use of APBD in each region has different proportions depending on the priorities of each region. However, unexpected events have resulted in the regions having to adjust their current APBD so that they do not affect other sectors. This study aims to test and find out whether there is an influence between spending not on the 2019-2020 regional budget deficit in Trenggalek Regency. This study uses quantitative research methods with a correlation approach so that the correlation between variables will be seen. The sampling technique was carried out with the Saturated Sampling technique, the researchers used this technique because the population in the study was not too large, namely the 2019-2020 budget period. The data collection technique used a documentation technique whose data was taken from the official website of the Trenggalek Regency Government. The data processing technique uses a simple linear regression technique so that it can be seen that there is a correlation between unexpected spending and the regional financial deficit of the Trenggalek Regency Government Budget. The 2019-2020 Trenggalek Regency APBD period is considered very complex, the APBD always experiences a surplus but at the end of the period there is a reshuffle of the APBD caused by the COVID-19 pandemic. Then with this problem the question arises, is there an influence or not between the two variables. With this research, it is hoped that it can become additional literature for the regions so that they can make good use of their regional budgets. After knowing the correlation of unexpected spending with regional financial deficits, the regions will be more careful to use the APBD. This is due to the fact that the APBD is not only used as a regional financial table but also as a benchmark for the success of the region in regulating and utilizing the potential of the region it has.

Keywords: *Unexpected Expenditure, Regional Finance Deficit, APBD, Trenggalek Regency.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah merupakan penggunaan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan prinsip-prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Dengan adanya dasar tersebut suatu pemerintah berhak melaksanakan urusan didalam rumah tangga daerahnya tanpa mengurangi kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

Dalam suatu pemerintahan dipastikan memiliki sistem terpadu yang mengatur tentang keuangan daerahnya, hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban suatu daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai secara finansial, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan dikeluarkannya kedua Undang-Undang ini bertujuan untuk dilaksanakannya desentralisasi yang diharapkan akan menghasilkan masing-masing daerah di Indonesia dapat melaksanakan urusan pengambilan keputusan, pemberdayaan masyarakat serta hal lain yang berhubungan dengan daerahnya masing-masing secara mandiri.

Konsep desentralisasi yang dikembangkan oleh Demelo (2000) bertujuan untuk menggeser faktor pendapatan dan pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi negara. Dengan mendekatkan pemerintah kepada warga negara, desentralisasi bertujuan untuk mendorong efisiensi di sektor publik, akuntabilitas dan transparansi publik dalam penyediaan layanan publik, serta pengambilan keputusan yang transparan dan demokratis. Pilihan desentralisasi yang dipraktekan dalam otonomi daerah sejatinya mengandung harapan lahirnya perbaikan dalam berbagai dimensi pemerintahan, baik dalam tatakelola pemerintahan, perbaikan dan peningkatan kualitas

pelayanan masyarakat di daerah serta penguatan demokrasi local dan aspek lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatur bahwa pengelolaan keuangan suatu daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan undang-undang yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dan memerhatikan asas keadilan serta kepatuhan. Keuangan daerah perlu memperhatikan asas efektif, efisien, transparan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Keuangan daerah adalah hal yang sangat penting pada pelaksanaan pemerintahan daerah, dikarenakan keuangan daerah merupakan tonggak penggerak pelaksanaan segala kegiatan di pemerintahan daerah. Jika dalam suatu organisasi kegiatan dapat berjalan dengan baik karena manajemen keuangannya dilakukan dengan baik. Begitu pula pemerintah daerah, pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik karena pengelolaan keuangan daerah yang baik. Seperti pada UUD tahun 1945 No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, merupakan rancangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah biasanya melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisa rasio keuangan APBD yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada periode tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana terjadi perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, belanja daerah adalah keseluruhan kewajiban milik daerah yang kemudian di akui sebagai penurunan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Besar kecilnya alokasi anggaran beban akan sejalan dengan besar kecilnya alokasi anggaran pendapatan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah selama periode Anggaran. "APBD terbagi menjadi tiga komponen umum, yaitu komponen penerimaan, belanja pembangunan, dan belanja rutin. Ketiga komponen itu walaupun disusun dalam waktu yang hampir bersamaan, namun proses penyusunannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda" (Halim, 2002).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020) mendefinisikan belanja tidak terduga sebagai "belanja tak terduga dapat diartikan sebagai beban pengeluaran anggaran yang bersifat luar biasa dan tidak mungkin diharapkan berulang kembali seperti penanggulangan bencana sosial, bencana alam, serta pengeluaran yang sebelumnya tidak terencanakan dan mendesak terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah". Disamping itu,

PSAP Nomor 02 paragraf 38 juga memberikan definisi yang sama tentang Belanja Tak Terduga. Dalam APBD di saat terjadi keadaan tak terduga yang ada dalam suatu pemerintahan daerah maka pemerintah daerah akan menggunakan jatah belanja tidak terduga APBD nya untuk mengatasi hal tersebut. Dengan demikian belanja tidak terduga juga dapat dikatakan sebagai anggaran cadangan pemerintah daerah.

PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 68 menyebutkan “bahwa belanja tidak terduga merupakan biaya dalam anggaran yang dibebankan kepada APBD dalam keadaan darurat, termasuk pada kebutuhan yang mendesak, dan pengembalian dari kelebihan pembayaran atas pendapatan daerah tahun sebelumnya”. Dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa peran penting dalam keuangan daerah dipegang oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga jika terjadi ketidak akuratan dalam pelaksanaannya akan menimbulkan kendala dalam perekonomian daerah.

“anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh manajemen selama satu periode yang terlihat secara kuantitatif” (Catur Sasongko, 2010). Sedangkan “anggaran adalah rencana pengelolaan keuangan yang mencakup perkiraan pengeluaran yang direncanakan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam jangka waktu tertentu” (Indra Bastian, 2010). Umumnya suatu anggaran di APBD berlaku pada kurun waktu satu tahun dan memperlihatkan penerimaan dan pengeluaran yang dirancang untuk tahun tersebut.

Secara umum, defisit anggaran dapat diartikan sebagai batas yang menunjukkan bahwa anggaran mengalami jumlah tingkat belanja lebih besar daripada tingkat pendapatan yang diperoleh. Namun, dapat terjadi ketidaksamaan konsep dan definisi anggaran pada suatu periode. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan tujuan dalam analisis serta metode pencatatan. Menurut Suratman dan Halim (2012) secara teori, cara untuk mengukur defisit anggaran dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Defisit Konvensional.
2. Defisit Moneter.
3. Defisit Operasional.
4. Defisit Primer.

Presiden mengeluarkan instruksi No. 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa dengan penetapan wabah COVID-19 sebagai pandemi global, maka dalam rangka percepatan proses penanganan covid 19 seluruh jajaran pemerintahan diwajibkan melakukan kegiatan refocusing, restrukturisasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan telah menyepakati keputusan bersama No.119/2813/SJ dan No.177/kmk.07/2020 yang

mengatur mengenai kewajiban seluruh pemerintahan daerah untuk menyesuaikan APBD TA 2020 dengan :

- a. Melakukan penyesuaian (penurunan) kepada target pendapatan dalam APBD;
- b. Menyesuaikan pengeluaran daerah dengan melakukan rasionalisasi terhadap belanja pegawai, barang, dan modal,
- c. Melakukan *Refocusing* serta realokasi pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan yang ditujukan untuk mempercepat penanganan covid-19.

Merujuk pada hal tersebut, seperti tertuang pada UUD tahun 1945 No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, saat ini pemerintah telah melakukan reformasi berupa semua instansi baik pemerintah pusat maupun daerah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pentingnya peran APBD dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan daerah (khususnya pemerintah Kabupaten Trenggalek) memberikan gambaran besar bagaimana pemerintah daerah melakukan tanggungjawabnya dalam kemajuan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri sejak periode tahun 2016-2018, APBD daerah mengalami surplus yang menandakan bahwa Kabupaten Trenggalek sedang mengalami perkembangan dan pembangunan yang baik. Namun sejak tahun 2019-2020 Indonesia dilanda pandemi covid-19 yang juga dirasakan oleh Kabupaten Trenggalek. Akibat dari pandemi covid-19 tersebut banyak sekali belanja tidak terduga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, sehingga belanja tidak terduga dalam APBD harus dirombak sedemikian rupa dan fokus dialokasikan pada penanggulangan covid-19 agar pemerintahan tetap berjalan.

Perombakan alokasi APBD akibat covid-19 masuk kedalam APBD bagian belanja tidak terduga. Dalam masa pandemi COVID-19, anggaran belanja tidak terduga menjadi hal yang menarik dibicarakan karena alokasi anggaran ini saat ini banyak digunakan untuk membiayai kegiatan penanganan COVID-19. Awal mula permasalahan yang muncul yaitu adanya perombakan APBD dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga berdampak pada pelaksanaan keuangan daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Trenggalek sebisa mungkin menyelamatkan ketercapaian urusan pemerintahan dengan melakukan perombakan APBD. Namun tidak hanya dengan melakukan perombakan APBD saja, demi meminimalisir pengeluaran alokasi APBD pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga membatalkan sejumlah proyek pembangunan. Salah satu nya yaitu penundaan proyek bedah rumah di Desa Pringapus Kecamatan Dongko dalam rangka program GERTAK yang direncanakan akan di anggarkan kembali pada APBD tahun 2022.

Menurut paparan Nur Arifin Bupati Trenggalek, pada tahun 2020 APBD Kabupaten Trenggalek mengalami perombakan sebesar 400 miliar. Hal tersebut dikarenakan turunnya pendapatan milik daerah yang berasal dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) serta anggaran alokasi lain karena pandemi covid-19. Pada tahun anggaran tersebut dana bagi hasil dikoreksi sebesar 23%, dana alokasi umum sebesar 10%, sedangkan dana alokasi khusus secara fisik sebesar 25% dan lain sebagainya. Sehingga Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan yang cukup banyak jika dihitung dari segi penerimaan.

Saat ini yang juga mengalami penurunan yang signifikan yaitu pada sektor pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut disebabkan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek membuat kebijakan yang berhubungan dengan perkumpulan masyarakat, yaitu menutup sementara beberapa destinasi wisata, menghapus pajak hotel dan restoran, serta menghapus retribusi sewa lahan dan gedung pemerintahan selama masa pandemi covid-19. Padahal PAD Kabupaten Trenggalek sendiri sebagian besar berasal dari sektor pariwisata. Sehingga secara keseluruhan dari segi pendapatan APBD kabupaten Trenggalek tahun 2020 mengalami pengurangan sebesar 320 miliar, kemudian anggaran tambahan dana belanja tidak terduga untuk keperluan penyelesaian pandemi covid-19 sebanyak 80 miliar. Sehingga perombakan APBD 2020 yang terdapat dalam realisasi APBD 2020 sebesar 400 miliar.

Tabel 1.
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Trenggalek
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja dan Transfer	2.290.748.785.526,19	2.025.841.017.382,55	88,44
Belanja Daerah	2.020.390.618.304,19	1.756.534.679.311,55	86,94
Belanja Operasi	1.484.038.904.918,50	1.345.375.690.444,79	90,66
Belanja Modal	527.919.886.486,41	407.775.819.287,93	77,24
Belanja Tak terduga	8.431.826.899,28	3.383.169.578,83	40,12
Transfer	270.358.167.222,00	269.306.338.071,00	99,61

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019

Terlihat dari tabel 1, target dan realisasi APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 diatas terlihat bahwa anggaran dan realisasi belanja tidak terduga masing-masing sebesar 8.431.826.899,28 dan

3.383.169.578,82 dan realisasinya sebesar 40,12 %. Dapat dilihat bahwa realisasinya kurang dari 50% dan dapat dikatakan tidak mencapai target pencapaian realisasinya.

Tabel 2.
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Trenggalek
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja dan Transfer	2.012.857.898.039,71	1.861.988.825.777,28	92,50
Belanja Daerah	1.739.648.953.239,71	1.591.413.234.370,28	91,48
Belanja Operasi	1.395.881.550.055,12	1.294.508.621.337,05	92,74
Belanja Modal	260.237.419.417,88	231.313.877.678,23	88,89
Belanja Tak terduga	83.529.983.766,71	65.590.735.355,00	78,52
Transfer	273.208.944.800,00	270.575.591.407,00	99,04

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020

Pada tabel 2 target dan realisasi APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 diatas terlihat bahwa anggaran dan realisasi belanja tidak terduga masing-masing sebesar 83.529.983.766,71 dan 65.590.735.355,00 dan realisasinya sebesar 78,52 %.

Dari uraian diatas, peneliti mendapatkan permasalahan yang harus diselesaikan dengan penelitian ini, yaitu:

- Apakah ada pengaruh belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah periode APBD 2019-2020?
- Seberapa besar pengaruh belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah periode APBD 2019-2020?

METODE PENELITIAN

Di dalam sebuah penelitian, metode dan jenis penelitian yang digunakan sebagai cara memperoleh data maupun mengolah data sangat mempengaruhi hasil dari penelitian. Untuk itu sebelum melakukan penelitian peneliti harus dengan cermat memilih metode/cara yang cocok dengan pembahasan yang direncanakan. Pada dasarnya terdapat 2 jenis penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Riset atau penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana pelaksanaannya berbentuk angka dan hitungan statistik untuk memperoleh hasil penelitian. Hal yang ditekankan pada penelitian kuantitatif yaitu fenomena secara objektif yang kemudian memaksimalkan pada objektivitas. Bentuk dari penelitian ini berupa

penggunaan hitungan dan pengolahan statistik, angka, serta struktur dan percobaan yang terkontrol.

Penelitian ini mengambil lokus di Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan hipotesis penelitian menguji pengaruh belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah periode APBD 2019-2020. Kabupaten Trenggalek merupakan daerah kabupaten yang termasuk kedalam daerah provinsi Jawa Timur dengan letaknya di bagian selatan Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri sejak periode tahun 2016-2018, APBD daerah mengalami surplus yang menandakan bahwa Kabupaten Trenggalek sedang mengalami perkembangan dan pembangunan yang baik. Namun sejak tahun 2019-2020 Indonesia dilanda pandemi covid-19 yang juga dirasakan oleh Kabupaten Trenggalek. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak dari belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah APBD Kabupaten Trenggalek periode 2019-2020.

Penelitian kuantitatif dan pendekatan korelasi digunakan dalam penelitian ini. Dikarenakan peneliti melakukan penelitian ini untuk menguji korelasi dari variabel dependen dan independen. (Sukmadinata, 2010) “pendekatan korelasional berencana untuk memutuskan bagaimana hubungan suatu variabel terhadap faktor-faktor yang berbeda. Hubungan tersebut kemudian dikomunikasikan dengan seberapa baik koefisien korelasi secara terukur”. Namun adanya hubungan antara setidaknya dua faktor, tidak berarti bahwa ada dampak atau hubungan sebab akibat dari satu variabel kemudian ke variabel berikutnya. Jumlah variabel yang dimiliki oleh penelitian ini yaitu 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yakni belanja tidak terduga, sedangkan variabel terikat yaitu defisit keuangan daerah periode APBD 2019-2020.

Seperti yang dikemukakan (Sugiyono, 1997) “Populasi merupakan keseluruhan wilayah yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi berkaitan dengan data, jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia”. Populasi dari penelitian ini yaitu berupa data pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek di periode 2019-2020.

Menurut (Arikunto, 2006) “Sampel merupakan sebagian atau perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan perwakilan dari populasi maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel”. Syahrin & Salim

(2012), dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 4 landasan dalam pengambilan sampel :

- a. Keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga.
- b. Lebih mudah dan lebih cepat.
- c. Memberikan informasi dan data yang lebih banyak dan akurat.

Sedangkan sampel dari penelitian ini yaitu data belanja tidak terduga yang terdapat di dalam APBD selama periode anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek 2019-2020. *probability sampling* dan *nonprobability sampling*

Suatu penelitian yang baik harus memiliki sampel yang dapat mewakili keseluruhan responden. Sehingga harus memiliki teknik sampling dalam penerapannya. Riduwan (2014) dalam bukunya yang berjudul Metode dan Teknik Penyusunan Tesis menyebutkan bahwa “Pada umumnya, ada dua jenis teknik sampling dalam penelitian, *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. *Probability sampling* dilakukan langsung dari populasi yang ada dalam penelitian. Sementara itu, pengujian *nonprobability sampling* dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa populasi oleh analisis dan kemudian membedah konstruksinya, sehingga setiap sampling dapat mewakili data”.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Jika dalam suatu penelitian semua anggota populasi dipergunakan sebagai sampel oleh peneliti maka teknik yang digunakan yaitu teknik sampling jenuh. Jumlah populasi pada penelitian ini kurang dari 30 populasi atau dianggap sedikit, selain itu dengan mengambil sampling jenuh maka data dapat digeneralisasikan dan adanya kesalahan akan relatif kecil. Peneliti menggunakan teknik ini karena populasi dalam penelitian tidak terlalu banyak yaitu APBD periode 2019-2020, sehingga sampel yang diambil adalah data belanja tidak terduga APBD periode 2019-2020 yang merupakan data yang terdapat didalam populasi. Teknik sampling ini juga sesuai dengan tujuan dari penelitian sehingga hasil yang didapatkan lebih mewakili masalah dan data yang ada.

Pengumpulan informasi berfungsi untuk merekam peristiwa atau atribut dari komponen populasi. Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah dokumentasi. Mengingat bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda pandemi dan aktivitas saat ini sedang dibatasi, teknik pengambilan data akan terfokus pada studi dokumentasi. Pada penelitian dengan pendekatan analisis isi, umumnya menggunakan instrumen dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni (laporan realisasi APBD Kabupaten Trenggalek periode 2019-2020) diambil dari website resmi pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dapat

diakses oleh masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder.

Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif setelah mengumpulkan data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap data belanja tidak terduga dan defisit dalam APBD Kabupaten Trenggalek periode 2019-2020 yang diperoleh untuk menganalisis masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Karena variabel yang terlibat dalam penelitian ini masing-masing ada satu baik variabel bebas maupun terikat, yakni belanja tidak terduga yang merupakan variabel bebas (X), kemudian defisit keuangan daerah APBD 2019-2020 yang merupakan variabel terikat (Y) maka penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Kemudian setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan statistik inferensial meliputi uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji linieritas data, uji regresi linier sederhana, uji hipotesis, kemudian uji koefisiensi determinasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan uji yang dilakukan pada tahapan statistik yang hasilnya menyatakan bahwa variabel dan data yang diteliti berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *one sample kolmogorov-smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansinya sebesar 0,05. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya yakni jika nilai *Asymp.sig (2-tailed) > 0,05* maka data berdistribusi normal namun jika *Asymp.sig (2-tailed) < 0,05* maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu syarat dari model uji regresi linier sederhana. Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual satu penelitian ke penelitian lain dalam model regresi linier sederhana. Sehingga syarat ketidaksamaan residual ini harus dipenuhi untuk dapat melakukan uji model regresi linier sederhana. Uji heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran pada variabel bebas yang acak. Penyebaran yang acak akan menunjukkan model regresi yang baik, dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas pada

data. Sehingga uji regresi linier sederhana dapat dilakukan. Untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas dapat dianalisis menggunakan grafik *scatterplot* dengan tandanya memiliki pola titik yang menyebar di atas dan bawah sumbu Y. Selain itu, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji *Glejser*. Uji Glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen.

3. Uji Linieritas Data

Uji linieritas data memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak. Uji linieritas data juga merupakan salah satu uji yang menjadi syarat dilakukannya uji regresi linier sederhana, sehingga apabila hasil yang didapatkan data dan variabel tidak linier maka tidak dapat dilanjutkan uji regresi linier sederhana. Sebaliknya jika uji menunjukkan bahwa data linier maka uji regresi linier sederhana dapat dilakukan. Aturan yang dipergunakan untuk menguji linieritas data adalah :

- 1) Jika signifikansi > 0.05 , maka data tidak mempunyai hubungan yang linier.
- 2) Jika signifikansi < 0.05 , maka data mempunyai hubungan yang linier.

4. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh hubungan dua variabel (variabel bebas dan terikat). Pada umumnya terdapat dua arah hubungan variabel yaitu positif dan negatif. Sehingga dengan uji regresi linier sederhana akan terlihat hubungannya menuju arah positif atau negatif. Dalam uji regresi besarnya nilai variabel terikat akan diketahui bertambah atau berkurang berapa kali tergantung dengan hubungan pengaruh kedua variabel. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan masing-masing variabel satu saja (satu variabel terikat dan satu variabel bebas), sehingga modelnya regresi linier sederhana.

Persamaan regresi yang digunakan untuk menggambarkan garis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y=a+bX$$

Dengan keterangan :

Y= variabel terikat

a= konstanta, harga y bila $x = 0$, bisa bernilai (+) maupun (-)

b= koefisien variabel x, bisa bernilai (+) maupun (-)

X= variabel bebas

5. Uji Hipotesis

Hipotesis didalam penelitian ini yaitu hipotesis korelasi yang melihat pengaruh antar variabel, variabel bebas dan terikat dimana variabel bebas (belanja tidak terduga) dan variabel terikat (defisit keuangan daerah APBD 2019-2020). Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan hipotesis korelasi sederhana karena jumlah variabel X dan Y hanya 1. Berdasarkan uraian tersebut peneliti berasumsi/hipotesis bahwa belanja tidak terduga dalam APBD 2019-2020 mampu mempengaruhi defisit keuangan daerah periode APBD 2019-2020 Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Setelah melakukan uji asumsi klasik dan model persamaan regresi linier sederhana memenuhi kriteria, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel X (belanja tidak terduga) terhadap variabel Y (defisit keuangan daerah APBD 2019-2020) dilakukan uji hipotesis dimana:

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah APBD 2019-2020.

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan antara belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah APBD 2019-2020.

6. Uji Koefisiensi Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Determinasi berada pada rentang angka (0) dan (1). Menurut (Ghozali, 2016) “nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel – variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen”.

Analisis Data

Tahap-tahap uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik uji dengan SPSS 22.0 untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh secara signifikan antara variabel terikat dan variabel bebas. Penggunaan SPSS 22.0 bertujuan untuk memperkuat analisis data yang dilakukan dan hasil yang didapatkan lebih akurat dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil lokus di Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan hipotesis penelitian menguji pengaruh belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah periode APBD 2019-2020. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri sejak periode tahun

2016-2018, APBD daerah mengalami surplus yang menandakan bahwa Kabupaten Trenggalek sedang mengalami perkembangan dan pembangunan yang baik. Namun sejak tahun 2019-2020 Indonesia dilanda pandemi covid-19 yang juga dirasakan oleh Kabupaten Trenggalek. Sehingga melalui penelitian ini maka terlihat terlihat pengaruh signifikan dari belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah APBD Kabupaten Trenggalek periode 2019-2020.

Hasil Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan uji yang dilakukan pada tahapan statistik yang hasilnya menyatakan bahwa variabel dan data yang diteliti berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *one sample kolmogorov-smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansinya sebesar 0,05. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya yakni jika nilai *Asymp.sig (2-tailed) > 0,05* maka data berdistribusi normal namun jika *Asymp.sig (2-tailed) < 0,05* maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

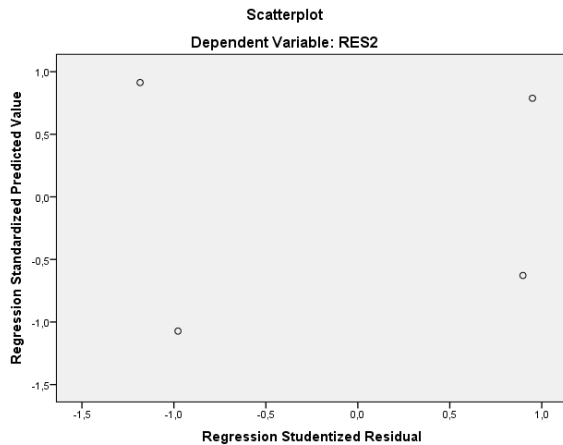
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		4
Normal	Mean	-,0000038
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	105619397190,24812000
Mosti	Absolute	,278
Extreme	Positive	,278
Differences	Negative	-,247
Test Statistic		,278
Asymp. Sig. (2-tailed)		, ^{c,d}
Monte	Sig.	,836 ^e
Carlo. Sig. 99% Lower	Bound	,826
(2-tailed) Confidence	Upper	
Interval	Bound	,845

a. Test.distribution.is.Normal.

Berdasarkan dari tabel 3, yaitu uji normalitas dengan uji *one sampel kolmogorov-smirnov* dapat diketahui bahwa dari nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,836. Nilai 0,836>0,05 jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal sehingga uji statistik dalam penelitian ini menjadi valid.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu syarat dari model uji regresi linier sederhana. Uji heterokedastisitas ditujukan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual satu penelitian ke penelitian lain dalam model regresi linier sederhana. Untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas dapat dianalisis menggunakan grafik *scatterplot* dengan tandanya memiliki pola titik yang menyebar di atas dan bawah sumbu Y.



Gambar 1.

Hasil Uji Heterokedastisitas (Grafik *Scatterplot*)

Berdasarkan uji heterokedastisitas dengan grafik *Scatterplot* tersebut, terlihat bahwa terdapat tanda titik-titik yang menyebar tidak beraturan/random serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam data sehingga layak menggunakan model regresi.

Tabel 4.

Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji *Glejser*)

Coefficients^a

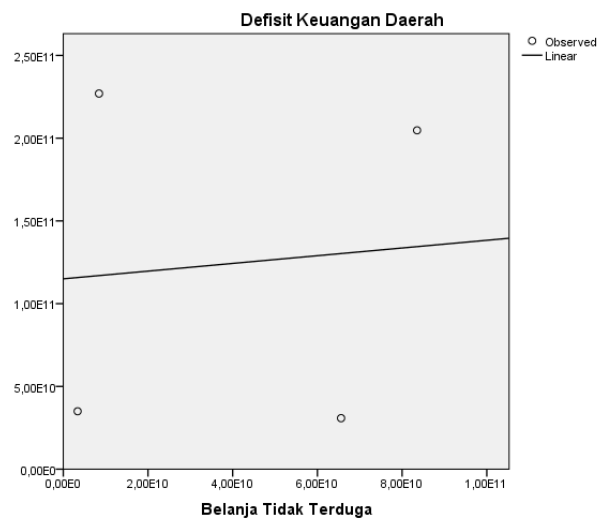
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	97646 09720 5,103	1518437 0256,95 3		6,431	,023
Belanja Tidak Terduga	-,186	,285	-,420	-,655	,580

Cara uji heterokedastisitas yang kedua menggunakan uji Glejser. Pada tabel 4 uji glejser terlihat bahwa nilai signifikannya $0,580 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak

menunjukkan terjadi heterokedastisitas. Melihat hasil tersebut maka data tersebut layak untuk di uji menggunakan uji regresi linier sederhana.

3. Uji Linieritas Data

Uji linieritas data memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak. Uji linieritas data juga merupakan salah satu uji yang menjadi syarat dilakukannya uji regresi linier sederhana, sehingga apabila hasil yang didapatkan data dan variabel tidak linier maka tidak dapat dilanjutkan uji regresi linier sederhana. Sebaliknya jika uji menunjukkan bahwa data linier maka uji regresi linier sederhana dapat dilakukan. Pada penelitian ini uji linieritas data menggunakan metode *curve estimation*.



Gambar 2.

Hasil Uji Linieritas Data (*Curve Estimation*)

Berdasarkan dari hasil uji linieritas dengan menggunakan *curve estimation*, data penelitian ini terlihat bahwa secara umum hubungan antara variabel X dan Y telah memiliki atau membentuk pola yang linear. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan variabel X dan variabel Y adalah linier. Sehingga untuk selanjutnya uji regresi linier sederhana dapat dilakukan dalam penelitian ini.

4. Uji Regresi Sederhana

Uji regresi linier sederhana dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh hubungan dua variabel (variabel bebas dan terikat). Pada umumnya terdapat dua arah hubungan variabel yaitu positif dan negatif. Sehingga dengan uji regresi linier sederhana akan terlihat hubungannya menuju arah positif atau negatif. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana dikarenakan jumlah variabel bebas dan terikatnya masing-masing 1 variabel. Dalam uji

sebelumnya data dinyatakan linier, sehingga uji regresi linier sederhana ini dapat dilakukan oleh peneliti.

Tabel 5.
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients. ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	11500 21380 80,523	98621 21191 5,464		1,16 6	,364
Belanja Tidak Terduga	,233	1,850	,089	,126	,911

a. Dependent Variable: Defisit Keuangan Daerah

Di dasarkan pada Tabel 5 dapat diperoleh persamaan regresi linier sederhana berikut :

$$Y=a+bX$$

$$\text{Defisit Keuangan Daerah} = 115002138080,523 + 0,233 (\text{Belanja Tidak Terduga})$$

Keterangan :

- Tanda (+) menandakan bahwa arah hubungan yang searah, sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbandi terbalik antara variabel bebas (belanja tidak terduga) dengan variabel dependen dan variabel terikat (defisit keuangan daerah).
- Nilai konstanta adalah 115002138080,523 yang berarti bahwa apabila nilai variabel belanja tidak terduga adalah konstan maka nilai defisit keuangan daerah sebesar 115002138080,523 satu satuan.

Nilai koefisien regresi belanja tidak terduga (X) merupakan 0,233 dengan bernilai positif yang memiliki arti antara variabel bebas dengan variabel terikat terdapat hubungan yang searah. Jadi jika belanja tidak terduga meningkat satu satuan maka defisit keuangan daerah akan meningkat pula sebesar 0,233 satu satuan dan apabila belanja tidak terduga menurun satu satuan maka defisit keuangan daerah juga akan menurun sebesar 0,233 satu satuan.

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (Uji T). Uji t bertujuan dalam melakukan uji kontribusi yang ditimbulkan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan variabel bebasnya yaitu belanja tidak terduga, kemudian variabel terikatnya yaitu defisit keuangan daerah.

Dalam uji hipotesis terdapat dua cara pengambilan keputusan, yaitu :

- Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau (sig-t) dengan taraf signifikansinya 0,05 :
 - Jika Signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
 - Jika Signifikansi < 0.05 maka H_0 ditolak yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung sebagai berikut :
 - Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
 - Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6.
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	1150 0213 8080, 523	9862121 1915,46 4		1,16 6	,364
Belanja Tidak Terduga	,233	1,850	,089	,126	,911

a. Dependent Variable: Defisit Keuangan Daerah

Hipotesis :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah APBD 2019-2020.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah APBD 2019-2020.

Cara 1

Dari tabel uji t terlihat bahwa nilai sig. adalah 0,911, jadi $0,911 > 0,05$ sehingga H_0 diterima yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah APBD 2019-2020.

Cara 2

$t_{tabel} = 4,302$ (diperoleh dari mencari nilai $df = n-k-1 = 4-1-1 = 2$, dengan membagi 2 nilai signifikansi $= 0,05$ yaitu $0,05/2 = 0,025$)

$t_{hitung} = 0,126$.

Jadi dari uraian diatas diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel} = 0,126 < 4,302$, sehingga didapatkan bahwa H_0 diterima yakni tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja tidak terduga dengan terhadap defisit keuangan daerah APBD 2019-2020.

Dari kedua cara tersebut peneliti lebih dominan terhadap cara pertama, yaitu menggunakan uji t. hal tersebut dikarenakan nilai dan hasil dari uji t yang dilambangkan oleh nilai sig. dinilai lebih valid dibandingkan dengan perhitungan melalui t tabel. Peneliti menggunakan kedua cara untuk membuktikan hipotesis diharapkan dengan melakukan kedua cara dan dengan hasil yang sama maka dapat dipastikan bahwa hasil dari uji t dapat dipertanggungjawabkan.

6. Uji Koefisiensi Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Determinasi berada pada rentang angka (0) dan (1). Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka nol (0) maka dapat diartikan kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat terbatas. Namun jika nilai koefisien determinasi variabel mendekati angka satu (1) maka kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat.

Tabel 7.

**Hasil Uji Koefisiensi Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,089 ^a	,008.	-,488	129356815028,22762

a. *Predictors : (Constant)*, Belanja Tidak Terduga

b. *Dependent Variable:* Defisit Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 7 diatas dengan variabel independennya belanja tidak terduga sedangkan variabel dependennya defisit keuangan daerah, menunjukkan nilai R yaitu sebesar 0,089 atau 8,9 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel belanja tidak terduga terhadap variabel defisit keuangan daerah sebesar 8,9 %.

Menurut (Johar Arifin, 2017) "nilai Adjusted R Square dapat naik ataupun turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Nilai

Adjusted R Square dapat bernilai negatif, sehingga jika nilainya negatif maka nilai tersebut dianggap 0, atau variabel bebas tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya".

Sedangkan nilai Adjusted R Square adalah -0,488. Dikarenakan nilai adjusted R Square bernilai negatif, maka dianggap 0. Jadi hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (belanja tidak terduga) tidak mampu menjelaskan variabel independen (defisit keuangan daerah).

Pembahasan

Belanja tak terduga adalah penggunaan anggaran untuk urusan yang sifatnya tidak dapat diantisipasi dan diharapkan tidak terulang, seperti penanganan peristiwa bencana alam, bencana sosial, dan untuk pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat serius terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sehingga belanja tidak terduga termasuk sebagai aspek didalam APBD yang dinamis.

Pada tahun 2019 didalam realisasi APBD Kabupaten Trenggalek terdapat realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.383.169.578,83 atau dalam persen sebesar 40,12% dari anggaran sebesar Rp8.431.826.899,28. Realisasi ini dipergunakan untuk pengembalian sisa dana hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2017, untuk dana tanggap darurat bencana kekeringan, dan untuk pengembalian atas sisa bantuan penyelenggaraan Pendidikan diniyah dan guru swasta dan BOP Madrasah Diniyah Provinsi Jatim.

Sedangkan pada Tahun 2020 terdapat realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp65.590.735.355,00 atau dalam persen sebesar 78,52% dari anggaran sebesar Rp83.529.983.766,71. Realisasi belanja tidak terduga periode 2020 ini dipergunakan untuk:

- 1) Penanganan darurat Covid-19 sebesar Rp65.560.486.659,00; Sedangkan Rincian Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 sebesar Rp65.560.486.659,00 sebagai berikut:

Tabel 8.

Rincian Belanja Tidak Terduga 2020

Belanja Pegawai	Rp 9.157.306.500,00
Persediaan	Rp 19.246.915.102,00
Belanja Jasa	Rp 81.921.686,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 53.547.925,00
Aset Tetap	Rp 2.820.795.446,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp 34.200.000.000,00
Jumlah	Rp 65.560.486.659,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Trenggalek 2020

- 2) Pengembalian sisa Dana Desa TA 2015 s.d. 2019 sebesar Rp30.248.696,00.

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih/(kurang) antara pendapatan, dengan belanja dan transfer dalam realisasi APBD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9.
Surplus/(Defisit) 2019

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	2.063.774.765.721,35	1.990.863.032.535,78	96,47
Belanja	2.020.390.618.304,19	1.756.534.679.311,55	86,94
Transfer	270.358.167.222,00	269.306.338.071,00	99,61
Surplus/(Defisit)	(226.974.019.804,84)	(34.977.984.846,77)	15,41

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Trenggalek 2019

Tabel 10.
Surplus/(Defisit) 2020

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.808.114.315.310,64	1.831.177.618.127,90	101,28
Belanja	1.739.648.953.239,71	1.591.413.234.370,28	91,48
Transfer	273.208.944.800,00	270.575.591.407,00	99,04
Surplus/(Defisit)	(204.743.582.729,07)	(30.811.207.649,38)	15,05

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Trenggalek 2020

Dari uraian tersebut terlihat bagaimana realisasi anggaran APBD periode 2019-2020 Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan hasil penelitian dari uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa belanja tidak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap defisit keuangan daerah. Hal tersebut memiliki arti bahwa naiknya nilai belanja tidak terduga belum tentu diiringi dengan naiknya defisit keuangan daerah, begitu pula penurunan nilai belanja tidak terduga belum tentu diiringi dengan menurunnya defisit keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan realisasi belanja tidak terduga periode 2019-2020 yang mengalami kenaikan dari 40,12% menjadi 78,52% berbanding terbalik atau tidak sejalan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2019-2020 yang justru mengalami penurunan realisasi dari 15,41% menjadi 15,05%. Hal tersebut membuktikan bahwa naiknya realisasi belanja tidak terduga belum tentu diiringi dengan naiknya realisasi defisit keuangan daerah.

Komponen didalam APBD sangatlah banyak tidak hanya belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga

sendiri masuk kedalam bagian belanja daerah bersama dengan belanja modal dan belanja operasi. Hal tersebut menjadikan salah satu faktor mengapa belanja tidak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah, yaitu dikarenakan terdapat banyak faktor dan komponen dalam APBD yang kemudian mempengaruhi defisit keuangan daerah dalam hal ini APBD serta variabel belanja tidak terduga bukan merupakan tolak ukur utama dalam penentuan defisit keuangan daerah.

Selain itu, tidak adanya pengaruh signifikan belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah juga dipengaruhi oleh realisasi belanja tidak terduga yang tidak memenuhi target anggaran dan realisasinya tidak optimal. Contohnya yaitu pada tahun anggaran 2019 Ada beberapa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan akan tetapi karena pengajuan pencairan dana melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka pembayarannya ditunda di Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut sangat mempengaruhi realisasi belanja tahun anggaran 2019 sehingga realisasinya tidak optimal.

Hasil dari penelitian ini yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasin (2017). Muhammad Yasin dalam penelitiannya menemukan kesimpulan bahwa, “Belanja daerah (belanja tidak terduga) terhadap kinerja keuangan daerah adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 0.729 (<1,96). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.078 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja daerah (belanja tidak terduga) terhadap kinerja keuangan daerah adalah negatif”. Hal tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah daerah belum mengoptimalkan belanja tidak terduga untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta proporsi belanja tidak terduga yang menyentuh langsung kepada publik belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang serupa juga di lakukan oleh Nurussakinah (2021). Nurussakinah dalam penelitiannya menemukan kesimpulan bahwa belanja daerah (belanja tidak terduga) Provinsi Sumatera Utara memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap APBD Sumatera Utara tahun anggaran 2005-2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam anggaran pendapatan daerah, realisasi belanja tidak terduga kurang maksimal sehingga defisit keuangan daerah menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara belanja tidak terduga dengan defisit keuangan daerah namun kedua variabel memiliki hubungan yang positif menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum berhasil

mengelola keuangan daerahnya melalui realisasi pengeluaran daerah (belanja tidak terduga).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Belanja Tidak Terduga Terhadap Defisit Keuangan Daerah Periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019-2020 Di Kabupaten Trenggalek “ peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

Secara parsial hasil penelitian dari uji hipotesis menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah. Ungkapan tersebut memiliki arti bahwa naiknya nilai belanja tidak terduga belum tentu diiringi dengan naiknya defisit keuangan daerah, begitu pula penurunan nilai belanja tidak terduga belum tentu diiringi dengan menurunnya defisit keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak faktor dan komponen dalam APBD yang kemudian mempengaruhi defisit keuangan daerah dalam hal ini APBD serta variabel belanja tidak terduga bukan merupakan tolak ukur utama dalam penentuan defisit keuangan daerah. Serta tidak adanya pengaruh signifikan belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah juga dipengaruhi oleh realisasi belanja tidak terduga yang tidak memenuhi target anggaran dan realisasinya tidak optimal.

Saran

Berikut saran yang peneliti kemukakan dari kesimpulan yang telah dipaparkan sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Dari hasil penelitian ini, ternyata tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja tidak terduga terhadap defisit keuangan daerah. Namun uraian itu tetap harus diperhatikan karena meskipun belanja tidak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap defisit keuangan daerah namun harus lebih dioptimalkan antara anggaran dan realisasinya agar kinerja keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan normal.

Kemudian dalam penganggaran belanja tidak terduga, sebaiknya pemerintah daerah melakukan riset terlebih dahulu agar pada realisasinya tidak terlalu tumpang tindih dan dapat menanggulangi permasalahan yang datang secara tidak terduga, tanpa menimbulkan permasalahan diakhir periode tersebut maupun periode mendatang.

2. Kepada Kalangan Akademisi

Dengan penelitian ini, peneliti berharap agar menambah wawasan para civitas akademik dalam penelitian yang untuk yang sesuai dengan variabel yang diteliti dalam bidang pemerintahan daerah.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penambahan variabel dan penggunaan objek penelitian yang berbeda pada penelitian selanjutnya sangat diperlukan agar lebih bisa mengembangkan ilmu tentang pemerintahan daerah khususnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan masalah-masalah yang ada didalamnya.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah ini diantaranya :

1. Tuhan YME
2. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
3. Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. selaku dosen pembimbing.
4. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. dan Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si. selaku dosen penguji.
5. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan do'a, restu dan dukungan.
6. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Regulasi :

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode Tahun 2019-2020 Kabupaten Trenggalek

Referensi :

Aini, Nur Ella., dan Muhammad Farid Ma'ruf. 2020. Faktor yang mempengaruhi nilai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Sidoarjo. *Publika. Vo.8, No.2*

Arifin, Johar. 2017. *SPSS untuk penelitian dan skripsi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Kotimah, Ila Kusnul., dan Muhammad Farid Ma'ruf. 2019. Pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2014-2018 di Kabupaten Bojonegoro. *Publika. Vol.7, No.9*

Kesuma, Wahyu Dewi., dan Fanida, Eva Hany. 2019. Manajemen strategi program gerakan tengok bawah masalah kemiskinan (GERTAK)

sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. *Publika*. Vol.7, No.9.

- Ma'ruf, Muhammad., dan prasetyo isbandono. 2016. Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) Dalam Penanganan Bencana Alam di Daerah. *Journal of Public Sector Innovation*. Vol.1, No.1.
- Mukhlis, Maulana dan Syarief Makhya. 2019. Implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah pasca pemekaran (studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 5, No. 2.
- Nurussakinah. 2021. *Analisis Kinerja Pengelolaan APBD Terhadap Perkembangan SiLPA Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2005-2019*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Pradana, Alicya Cindy., dan Muhammad Farid Ma'ruf. 2021. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Publika*. Vol. 9, No. 1, 285-294.
- Sugiri, Dani. 2021. Perlakuan akuntansi belanja tak terduga pada pemerintahan daerah akibat pandemi covid-19. *JPSI (Jurnal ilmiah akuntansi keuangan)*. 10(1). 47-54..
- Syahrum., dan Salim. 2012. *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media
- Yasin, Muhammad. Dkk. 2017. Analisis pengaruh struktur APBD terhadap kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi&Bisnis*. Hal 493-510

